

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan yaitu faktor utama untuk memainkan peran organisasi pada rangka mencapai semua tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang dapat mengubah maupun membimbing staf nya. Ini bukan tugas yang mudah, semua orang memiliki sikap maupun minat yang tidak sama. maksudnya, keberhasilan atau kegagalan terpenuhinya suatu organisasi berpengaruh pada kekuasaan seorang pemimpinnya. Hal utama kepemimpinannya yaitu Langkah supaya tercapainya tujuan organisasi melalui kepemimpinan, bimbingan, dan pengaruh terhadap anggota lainnya. Mengingat pemimpin bukan benda mati, melainkan orang dengan sikap maupun karakter yang tidak sama, sehingga kepemimpinan tidak boleh dianggap remeh. Kehendak pemimpin termasuk sarana untuk mencapai harapan organisasi, sehingga pada bawahan terpenuhi keperluannya berdasarkan keterampilannya maupun kemampuan pemimpin.¹

Berdasarkan etimologis, kepemimpinan adalah kemampuan maupun sikap individu untuk berpengaruh dan mendorong individu supaya mengambil tindakan supaya tercapainya harapan semuanya, maka menjadikan orang-orang yang terlibat sebagai struktur awal dari proses kelompok.² Kepemimpinan diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan maupun mempengaruhi individu. Wewenang guna apparatus, sarana atau siklus untuk meyakinkan individu supaya perlu mencapai sesuatu. Ada beberapa faktor yang menggerakkan individu, khususnya bahaya, hadiah, otoritas, dan pengaruh.³

¹ Edy Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Kencana, 2009). 213.

² Kartini Kartono. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Rajawali, 1983). 38

³ Moh. Salim Al-Djufri. *Kepemimpinan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 6

Kepemimpinan untuk media, sarana maupun tahapan supaya mendorong individu supaya dapat menjalankan tanpa paksaan.⁴ Kepala desa yaitu kepala pemerintahan desa yang melalui pemerintahan sesuai bagi kebijakan yang dikembangkan bersama BPD. Kepala desa yaitu pimpinan lembaga eksekutif utama yang ada di pedesaan yang dibantu beberapa perangkat desa saat menjalankan tugasnya.⁵

Desa menurut peraturan pemerintahan No.722005 tentang pemerintahan desa Bab I Pasal No 5, desa yaitu sekumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah, memiliki kewenangan dalam mengkoordinasi maupun mengurus keperluan warga daerah, berpedoman asal-usul maupun adat istiadat lokal yang mereka akui atau hormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Sedangkan UU 6 Tahun 2014 Desa memerlukan banyak pertimbangan, oleh karena itu desa dilindungi dan diberi kewenangan agar mandiri maju dan demokratis guna meletakkan dasar yang kokoh untuk masyarakat yang sejahtera. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan desa, lokasi dan jenis, hingga pembinaan dan pengawasan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat dan demokratis harus mengutamakan persatuan dan kesatuan negara. Bentuk ketatanegaraan terbentuk melalui perkembangan seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, desa juga mempunyai hak asal usul serta hak tradisional saat mengatur maupun menjaga keperluan umum serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan, desa diberi kekuasaan yang kuat, maju, mandiri maupun demokratis, akibatnya tercipta landasan yang kuat saat menjalankan pemerintahan maupun pembangunan yang adil sejahtera serta masyarakat yang makmur oleh karena itu posisi desa harus diakui maupun

⁴ Rivai, Veithzal dan Mulyadi Deddy. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 2

⁵ Rivai, Veithzal dan Mulyadi Deddy. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, 2

⁶ Undang-Undang No 32 tahun 2004, *Tentang pemerintahan otonomi daerah*. 14

diberikan jaminan atas keberlanjutan hidupnya di Negara Republik Indonesia.

Di Indonesia sendiri desa adalah bagian penting dari masyarakat. Keberadaan desa tidak boleh dianggap sepele karena keberadaan desa sangat penting. Kata desa berasal dari bahasa sansekerta *Deshi* yang memiliki arti daerah lahir. Desa menurut H.A.W Widjaja pada bukunya dengan judul “Otonomi Desa” mengungkapkan bahwa⁷, desa adalah suatu kesatuan komunitas hukum yang memiliki hak khusus. Berdasarkan pemikiran tentang pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi maupun pengembangan komunitas.

Desa sendiri mempunyai pembagian administrasi yang dipimpin oleh kepala desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa mencakup dari pemerintahan desa termasuk kepala desa maupun perangkat desa serta juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa juga punya hak atas penyusunan peraturan desa yang sudah disepakati dengan BPD. Namun dalam pemerintahan desa, kedudukan kepala desa bukanlah seorang penguasa dalam bidang kekuasaan yang dapat mengatur jalannya suatu pemerintahan.

Kepala desa adalah contoh kepemimpinan tingkat dasar yang harus memiliki kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin juga harus memiliki beberapa ciri yaitu loyalitas, pemimpin harus setia pada kebaikan, pendidikan, pemimpin harus bisa mendidik kadernya, memberi nasehat, pemimpin yang baik harus setia pada kadernya, disiplin, pemimpin harus tegas. mampu membentuk Contoh kedisiplinan dan ketaatan pada segala hal kedisiplinan.

Pemerintah desa merupakan dasar atas segala urusan pemerintahan dan berhak mengkoordinasi maupun mengurus keperluan warga daerah sesuai adat istiadat yang dimiliki oleh sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu penguatan pemerintah desa saat mengkoordinasi warga supaya ikut serta saat pembangunan. Peran utama kepala desa maupun pemimpin pada sistem sosial Indonesia mengakibatkan jabatan kepala desa menjadi begitu utama. Akibatnya warga

⁷ Hamzah Yakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan, Bandung*, CV Diponegoro. 125

membuat kepala desa untuk acuan saat aktivitas keseharian, contohnya hak politik, sipil, maupun kekeluargaan. Kepala desa adalah bagian yang memiliki posisi begitu dihormati, kepala desa memiliki pengaruh utama dalam pertumbuhan warga itu, kepala desa bagian warga dikarenakan perannya untuk seorang figur yang memiliki pengetahuan banyak maupun luas tentang berbagai hal.

Menurut Ya'qub Bin Ibrahim, gaya seorang pemimpin atau pemerintahan berkaitan dengan sumber daya alam dan kekayaan alam suatu negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan melindungi kesejahteraan rakyatnya. Salah satu pernyataannya tentang kewajiban seorang pemimpin berbunyi: "Menurut Allah, penguasa yang berhasil adalah yang mensejahterakan rakyat. Sedangkan menurut Allah, penguasa yang jahat adalah yang menyengsarakan rakyat."⁸

Teori kewajiban negara yang dikemukakan oleh Ya'qub Bin Ibrahim memiliki tiga konsep dasar, yaitu: Konsep pertama adalah melaksanakan pemerintahan yang efektif. Yang disebut pemerintahan yang efektif berarti bahwa sebelum kebijakan nasional yang menyangkut kepentingan sosial harus selalu berorientasi pada tujuan dan memenuhi persyaratan kepentingan. Ya'qub Bin Ibrahim juga menjelaskan bahwa tugas pokok penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, kekayaan milik negara, terwujudnya dan terjaminnya kemakmuran warga. Negara wajib memenuhi segala kepentingan warga maupun pengembangan segala kebijakan untuk kemakmuran umum.⁹

Konsep yang kedua adalah Pemeliharaan hak rakyat Sebagai wujud dari pemeliharaan hak rakyat. Ya'qub Bin Ibrahim mengungkapkan mengenai kepala negara memiliki kewajiban menyampaikan penerangan secara transparan dengan langsung pada rakyatnya mengenai apapun yang berkaitan tentang kekayaan maupun programnya yang dijalankan meliputi pemenuhannya hak warga, serta negara berhak menyalurkan kejelasan untuk warga mengenai hak

⁸ Abdullah Budi, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012. 325.

⁹ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1382, Terjemahan Abdullah Ali, Jakarta ; Serambi, 2006. 15.

maupun kewajiban mereka, utamanya segala hal yang berhubungan tentang hukum.¹⁰

Konsep yang ketiga adalah pengelolaan keuangan publik. Mengenai pengelolaan keuangan publik Ya'qub Bin Ibrahim memberikan referensi dalam kebijakan ekonomi politik dan hubungan dengan pemerintahan, serta prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, khususnya dalam bidang perpajakan. Ya'qub Bin Ibrahim menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pengelolaan seluruh aset milik negara dan sistem perpajakan akan meningkatkan kemakmuran negara. Disisi lain, jika pengelolaan kekayaan dan perpajakan dilakukan secara tidak adil maka negara akan hancur.¹¹

Teori kewajiban negara yang dijelaskan oleh Ya'qub Bin Ibrahim adalah teori kewajiban negara. Beliau mengungkapkan mengenai suatu negara itu berkewajiban melindungi keperluan warga maupun terciptanya suatu kejayaan untuk semuanya. Hal tersebut juga terlihat dalam model kepemimpinan yang dijalankan kepala Desa Tamansari, Kec Jaken, Kab Pati.

Teori kewajiban negara menurut Ya'qub Bin Ibrahim yang telah dibagi menjadi tiga konsep dasar sudah sesuai dengan teori yang dijalankan di Desa Tamansari ini, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pemeliharaan hak rakyat seperti contohnya bantuan pembangunan rumah, modal usaha dan bantuan sosial lainnya. Sampai pada pengelolaan keuangan publik yang bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur desa serta fasilitas publik yang sangat rapi.

Konsep kepemimpinan dalam perspektif ketatanegaraan Ya'qub Bin Ibrahim mengemukakan pendapat bahwa kepala negara atau kepala daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi keperluan warga maupun terciptanya kesejahteraan untuk semua. Ya'qub Bin Ibrahim yakin bahwa menjaga adanya pemerintahan yang efektif adalah kebijakan nasional yang berhubungan keperluan warga.

¹⁰ Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1382, Terjemahan Abdullah Ali, Jakarta ; Serambi, 2006. 16.

¹¹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa kini*, terjemahan Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, Jakarta: Serambi, 2006. 65.

Pengembangan yang efektif sendiri membutuhkan keterlibatan antara rakyat dengan semua bagian penanggung jawab keperluan pada saat menyusun rancangan aktivitas yang kemudian mensugesti mereka. Pada saat warga mengikuti, sehingga keikutsertaan kemudian disebut begitu kuat untuk efektivitas, efisiensi maupun kemajuan desa. Pada terlaksananya perkembangan infrastruktur desa keterlibatan warga desa untuk ikut serta, hal tersebut bisa dijumpai dengan adanya sumbangan energy, pandangan serta material.

Kepala desa begitu memiliki peran penting pada pembangunan partisipasi warga. Kepala desa berperan pembangunan kesadaran masyarakat dengan kebijakan strategis yang dirancang maupun secara program-program yang dijalankannya. Rakyat termasuk memiliki peran yang kuat dalam kesuksesan pembangunan yang ada di desa.

Desa Tamansari yaitu bagian desa di Kecamatan Jaken yang letaknya dekat pada perbatasan Kecamatan Jaken dengan Kecamatan Batangan. Perbatasan sebelah utara Desa Tamansari adalah Desa Kuniran, perbatasan bagian timur adalah Kabupaten Rembang, perbatasan bagian selatan ialah Desa Sumberejo, maupun perbatasan bagian barat ialah Desa Sumberarum.

Desa Tamansari adalah bagian dari 21 desa di wilayah Kecamatan Jaken. Desa Tamansari ini bisa disebut sebagai desa yang sangat maju di Kecamatan Jaken karena hampir memiliki segala fasilitas publik yang hampir lengkap terpenuhi di desa ini, angka kemiskinan di Desa Tamansari dalam kurun waktu lima tahun ini tercatat hanya 15%. Desa Tamansari dipimpin oleh Agus Amin S.T, yang masa kepemimpinannya sudah memasuki tahun ketiga periode.

Dibawah kepemimpinan Gus Amin ST, Desa Tamansari telah mengalami banyak kemajuan. Mulai dari infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum serta bantuan kepada seluruh rakyat termasuk kepada masyarakat miskin. Pada periode kedua kepemimpinannya, semua fasilitas umum dimulai dengan pembangunan jalan internal dan eksternal antar Desa Tamansari dan Sumberan, pembangunan bumdes, pembangunan lampu kota sepanjang jalan Jaken-Batangan Km 01, dan pembangunan lapangan olahraga. Serta transparansi

informasi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat desa.

Alasan mengapa peneliti tertarik kepada penelitian ini karena teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh Ya'qub Bin Ibrahim dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan Desa Tamansari saling memiliki keterkaitan, saya sebagai penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dalam Perspektif Ya'qub Bin Ibrahim”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah gaya kepemimpinan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dengan menggunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ya'qub Bin Ibrahim.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana gaya kepemimpinan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Jaken kabupaten Pati dalam perspektif Ya'qub Bin Ibrahim?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa Tamansari Kecamatan Jaken kabupaten Pati menurut perspektif Ya'qub Bin Ibrahim.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dari setiap bagian atau keterkaitan penelitian ilmiah sistematis selanjutnya. Berikut ini adalah kajian sistematis dari penelitian yang akan ditulis:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistem penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini menjelaskan pengertian konsep yang berkaitan dengan judul penelitian termasuk pengertian strategi, metode dan faktor.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, topik penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengembalian validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi latar belakang dan pembahasan dalam mendukung dan melarang strategi pembangunan desa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, saran dan rekomendasi.

